

BAB II

KAJIAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PENELITIAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Teori

2.1.1. *Political Cost Hypothesis*

Political Cost Hypothesis merupakan salah satu bagian dari *Positive Accounting Theory* yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986). Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki ukuran relatif besar, cenderung menghadapi biaya politis (*political cost*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Biaya politis tersebut dapat muncul dalam bentuk meningkatnya perhatian pemerintah, regulator, investor, media, maupun masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. Semakin besar skala suatu perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut menjadi perhatian publik dan memperoleh pengawasan yang lebih intensif.

Perusahaan besar umumnya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks, jumlah aset yang lebih besar, serta tingkat transaksi dan kepentingan ekonomi yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai perusahaan menjadi lebih relevan bagi berbagai pihak, sehingga perusahaan dituntut untuk menunjukkan tingkat transparansi dan kepatuhan yang lebih tinggi. Pengawasan yang semakin besar dapat mendorong manajemen untuk mengurangi

kemungkinan munculnya persepsi negatif dari pihak eksternal melalui penyediaan informasi perusahaan secara memadai dan Cepat Waktu.

Dalam konteks pelaporan keuangan, tekanan politis dan pengawasan publik dapat mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan. Kecepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sekaligus menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan transparansi kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan berpotensi memperoleh perhatian negatif dari regulator maupun publik karena keterlambatan tersebut dapat dipersepsikan sebagai kurang optimalnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pelaporan.

Selain menghadapi tekanan politis yang lebih tinggi, perusahaan besar pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai dibandingkan perusahaan kecil. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga profesional, sistem informasi akuntansi, teknologi, struktur organisasi, serta prosedur pengendalian internal yang lebih berkembang. Ketersediaan sumber daya tersebut dapat membantu perusahaan dalam menjalankan proses pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan, dan penyusunan informasi keuangan secara lebih efektif. Dengan demikian, perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyelesaikan proses pelaporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan perspektif *Political Cost Hypothesis*, semakin besar ukuran

perusahaan, semakin tinggi pula perhatian dan pengawasan yang diterima perusahaan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan transparansi, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, dan menghindari konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat keterlambatan penyampaian informasi. Di sisi lain, dukungan sumber daya dan sistem pelaporan yang lebih memadai pada perusahaan besar juga dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan secara teoritis dapat memiliki hubungan dengan kecepatan waktu pelaporan keuangan.

2.1.2. *Organizational Learning Theory*

Organizational Learning Theory menjelaskan bahwa organisasi dapat memperoleh, mengembangkan, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan yang berasal dari pengalaman serta proses pembelajaran yang berlangsung secara berkelanjutan. Pengalaman yang diperoleh organisasi dari waktu ke waktu dapat membentuk pengetahuan, rutinitas, prosedur, dan kemampuan organisasi dalam menghadapi berbagai kondisi. Dengan adanya proses pembelajaran tersebut, organisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan aktivitasnya.

Dalam konteks perusahaan publik, proses pembelajaran organisasi dapat dikaitkan dengan pengalaman perusahaan selama menjalankan kegiatan sebagai perusahaan yang tercatat di pasar modal. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan pengalaman tersebut adalah umur listing, yaitu lamanya suatu perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Semakin lama perusahaan tercatat di

pasar modal, semakin banyak pengalaman yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan berbagai kewajiban sebagai perusahaan publik, termasuk kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.

Perusahaan yang telah lama menjadi perusahaan publik telah melalui proses pelaporan keuangan secara berulang dari tahun ke tahun. Pengalaman tersebut memungkinkan perusahaan untuk memahami tahapan pelaporan, kebutuhan informasi, prosedur administrasi, serta ketentuan dan tenggat waktu yang harus dipenuhi. Proses yang dilakukan secara berulang dapat membentuk rutinitas organisasi sehingga kegiatan pelaporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan terorganisasi.

Kaitannya dengan kecepatan waktu pelaporan keuangan, pengalaman yang terakumulasi selama perusahaan menjadi perusahaan publik dapat membantu perusahaan memahami pentingnya pemenuhan batas waktu pelaporan. Semakin lama umur listing suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki dalam menghadapi siklus pelaporan keuangan. Pengalaman tersebut dapat membentuk prosedur dan rutinitas yang lebih matang sehingga proses penyusunan serta penyampaian laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih terencana dan efisien.

Berdasarkan *Organizational Learning Theory*, pengalaman organisasi merupakan salah satu sumber pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam penelitian ini, umur listing digunakan sebagai indikator pengalaman perusahaan sebagai perusahaan publik. Perusahaan dengan umur listing yang lebih panjang diperkirakan telah memiliki

pengetahuan, prosedur, dan rutinitas pelaporan yang lebih matang, sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi batas waktu penyampaian laporan keuangan. Oleh karena itu, umur listing secara teoritis dapat dikaitkan dengan kecepatan waktu pelaporan keuangan.

2.2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini memuat landasan teori kepustakaan yang mendasari penelitian untuk mendukung penyelesaian masalah tentang kajian kepemilikan publik, ukuran perusahaan, umur listing, reputasi Kantor Akuntan Publik, dan kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.2.1. Kepemilikan Publik

2.2.1.1. Pengetian Kepemilikan Publik

Di dunia bisnis modern, struktur kepemilikan berfungsi sebagai indikator tingkat transparansi dan tanggung jawab sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan tersebut salah satunya berbentuk kepemilikan publik. Menurut Tarisa et al. (2024) kepemilikan publik adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar dan tidak terafiliasi dengan manajemen atau pemilik perusahaan.

Menurut Harefa (2024), kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam perusahaan karena dapat mempengaruhi perusahaan melalui media massa baik berupa kritikan maupun komentar yang semuanya dianggap sebagai suara publik atau masyarakat.

Menurut Dewi et al., (2022), kepemilikan publik adalah Kepemilikan publik merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat. Persentase kepemilikan publik yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan karena adanya campur tangan publik agar perusahaan menerapkan pengelolaan perusahaan yang baik yang akan turut serta meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sangat penting untuk diketahui oleh calon investor yang hendak menanamkan modalnya pada suatu perusahaan.

Menurut Dewi & Heliawan (2021), kepemilikan publik adalah

“Kepemilikan publik adalah proporsi jumlah kepemilikan oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.”

Menurut Delima & Herawaty (2020), kepemilikan publik adalah

“Kepemilikan Publik yaitu seberapa besar persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh Publik. Dengan banyaknya persentase saham, manajer akan membagikan banyak informasi terkait perusahaan.”

Menurut Franita (2018 : 15) kepemilikan publik adalah kepemilikan yang dimiliki oleh publik (Masyarakat). Dalam meningkatkan nilai perusahaanya diperlukan pendanaan yang baik melalui pendanaan internal maupun eksternal. Sumber pendanaan eksternal tersebut di dapatkan dari masyarakat. Kepemilikan publik merupakan persentase saham yang dimiliki oleh publik.

Berdasarkan uraian di atas, kepemilikan publik adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum (publik) yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Masyarakat tersebut dapat seorang

individu atau intitusi luar yang tidak termasuk manajemen, pendiri, maupun pemegang saham pengendali.

2.2.1.2. Tujuan dan Peranan Kepemilikan Publik

Beberapa ahli dan peneliti memberikan pernyataan terkait tujuan dan peranan kepemilikan publik.

Menurut Kaur et al., (2022 : 346-351) tujuan utama kepemilikan publik merupakan salah satu upaya utama dalam meningkatkan transparansi perusahaan dan disiplin pasar. Pemegang saham publik memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku manajemen, terutama ketika mekanisme pengawasan institusional masih berkembang.

Kehadiran basis investor publik yang luas juga terbukti berkontribusi terhadap praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tercatat. Selain itu, ketentuan *free float* yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan likuiditas pasar serta mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam kepemilikan saham. Dengan demikian, kepemilikan publik tidak hanya berfungsi sebagai indikator keterbukaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan dan penguatan tata kelola yang mendorong efisiensi serta kepercayaan dalam pasar modal Indonesia.

Menurut Miaoui et al., (2014) peranan kepemilikan publik tercermin melalui penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pemegang saham publik. Prinsip *transparency* menegaskan bahwa keterbukaan

informasi diperlukan agar publik dapat menilai kinerja dan tata kelola perusahaan secara objektif, sementara prinsip *accountability* mengharuskan manajemen bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil serta mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham publik sebagai bentuk pengawasan terhadap pengendali perusahaan.

Pemegang saham publik, termasuk investor minoritas, harus diperlakukan secara adil dan diberikan akses informasi serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan korporasi terbukti memperkuat akuntabilitas dan disiplin pasar, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tercatat.

Berdasarkan uraian di atas tujuan kepemilikan publik untuk menciptakan pasar modal yang transparan, likuid, dan pasitipatif. Dalam tujuan ini juga secara tersirat menekankan pentingnya untuk menciptakan pasar lebih terbuka dan melibatkan banyak orang. Peranan kepemilikan publik sebagai alat untuk mengawasi dan memastikan perusahaan bertindak akuntabel yang akan tercermin melalui prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap pemegang saham publik.

2.2.1.3. Manfaat Kepemilikan Publik

Dalam sudut pandang perusahaan, kepemilikan publik menjadi sumber pendanaan eksternal yang memperkuat modal. Sedangkan, dalam sudut pandang masyarakat (Publik), kepemilikan publik menunjukkan partisipasi setiap individu sebagai investor untuk mendapat keuntungan.

Menurut Decerly (2022), manfaat kepemilikan publik bagi perusahaan

adalah meningkatkan nilai perusahaan maka diperlukan pendanaan yang diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Sumber pendanaan eksternal diperoleh dari saham masyarakat (publik). Pengawasan operasional perusahaannya cenderung lebih ketat jika dimiliki oleh investor publik. Karena pihak investor publik memaksa agar investasi yang mereka lakukan dapat pengembalian yang lebih besar.

Menurut Fitriasisuri et al., (2022), manfaat lain dari kepemilikan publik dari sudut pandang masyarakat (publik) bisa disebut dengan investasi. Ada 5 manfaat investasi ialah potensi penghasilan jangka panjang, mengungguli inflasi, memberikan penghasilan tetap, bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan anda bisa berinvestasi sesuai dengan keadaan keuangan. Dengan demikian berdasarkan alasan tersebut maka dari penelitian ini sejalan dengan teori manfaat investasi dimana investasi mempunyai manfaat dimasa yang akan datang seperti untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas manfaat kepemilikan publik dirasakan oleh berbagai pihak. Dari sudut pandang perusahaan, kepemilikan publik berperan sebagai pendanaan eksternal yang dapat memperkuat struktur modal, mendukung ekspansi usaha, dan menjaga keseimbangan modal. Sementara itu dari sudut pandang masyarakat, kepemilikan publik menjadi sebuah investasi yang akan mendorong kesejahteraan setiap individu yang melakukannya,

2.2.1.4. Proksi Kepemilikan Publik

Menurut para peneliti seperti Tarisa et al., (2024), Utami & Wijayanti (2023), Putra & Rumantir (2022), kepemilikan publik dihitung dengan saham yang dimiliki publik dibagi dengan saham yang beredar.

Maka, rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Kepemilikan Publik} = \frac{\text{Saham yang dimiliki publik}}{\text{Total saham beredar}}$$

2.2.2. Ukuran Perusahaan

2.2.2.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kapasitas operasional, skala bisnis, dan pengaruh perusahaan di pasar. Ukuran ini dapat diukur dari berbagai aspek yang dapat membantu menilai posisi dan daya saing perusahaan dalam setiap sektor. Menurut Ovelina et al. (2024) ukuran perusahaan adalah sebuah pengelompokan perusahaan ke dalam kategori tertentu berdasarkan besaran atau skala perusahaannya.

Menurut Nuridah et al., (2023), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi struktur modal, serta ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut.

Menurut Kusumaningrum & Iswara (2022), ukuran perusahaan dapat diartikan juga menjadi skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan

dengan cara yaitu total aktiva, nilai pasar saham dan Semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal.”

Menurut Dewi & Praptoyo (2022) ukuran perusahaan adalah menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya jumlah modal yang perusahaan gunakan, total aset yang perusahaan miliki, dan total penjualan yang perusahaan peroleh. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan tinggi memiliki akses yang mudah karena telah mempunyai kedudukan yang kuat pada pasar modal sehingga perusahaan yang memiliki skala ukuran yang besar dapat dengan mudah mendapatkan tambahan dana dari pihak eksternal yang selanjutnya perusahaan dapat memperoleh laba/keuntungan yang maksimal guna meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut buku karya Hery (2017) ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat menentukan persepsi investor terhadap perusahaan tersebut. Investor cenderung memberikan perhatian yang khusus terhadap perusahaan besar karena dianggap memiliki kondisi yang lebih stabil dan lebih mudah dalam hal memperoleh sumber pendanaan yang bersifat internal maupun eksternal.

Menurut buku karya Riyanto (2016) ukuran perusahaan adalah

“Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva.”

Berdasarkan uraian di atas ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu

perusahaan yang dapat memengaruhi struktur modal, akses pendanaan, dan persepsi investor. Ukuran perusahaan biasanya diukur menggunakan total aset, nilai ekuitas, penjualan, dan nilai saham pasar. Perusahaan yang lebih besar akan cenderung memiliki posisi yang kuat di pasar modal.

2.2.2.2. Proksi Ukuran Perusahaan

Menurut para peneliti, proksi ukuran perusahaan diantaranya :

1. Menurut Nuridah et al., (2023), ukuran perusahaan dapat diukur dari nilai total aset yang dimiliki. Total aset tersebut menggambarkan kapasitas dan skala operasi perusahaan secara keseluruhan.
2. Brigham dan Houston (2018 : 44), ukuran perusahaan dapat dihitung melalui penjualan bersih atau total aset.
3. Riyanto (2016), ukuran perusahaan dapat dihitung dari ekuitas, penjualan, dan aktiva.

Menurut Dang et al., (2017), pemilihan ukuran perusahaan perlu didukung oleh teoritis dan empiris yang mendukung karena setiap masing-masing ukuran mencerminkan dimensi yang berbeda dari karakteristik perusahaan. Dalam kasus tersebut, total aset mampu mencerminkan keseluruhan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Dang et al., (2017) memperlihatkan bahwa 100 artikel akademik yang diteliti menunjukkan bahwa total aset merupakan ukuran yang paling dominan digunakan sehingga memperkuat rasionalitas metodologis penggunaan proksi ini dalam penelitian. Jadi, dalam

penelitian ini pun peneliti menggunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan.

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

Ln merupakan logaritma natural. Hal ini digunakan karena aset umumnya pada setiap perusahaan sering bernilai sangat besar dan akan memicu perbedaan saat melakukan analisis statistik.

2.2.3 Umur Listing

2.2.3.1. Definisi Umur Listing

Umur listing perusahaan mencerminkan lamanya sebuah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indikator ini sering digunakan untuk menilai sebuah pengalaman bagi setiap perusahaan di pasar modal dan juga rekam jejak kinerja atau tata kelola. Menurut Supartini et al. (2021) ukuran perusahaan adalah lamanya waktu yang telah ditempuh sejak perusahaan berdiri hingga saat ini.

Menurut Satwika & Sari (2021), umur listing adalah umur perusahaan yang dihitung sejak perusahaan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) (masuk menjadi anggota Bursa Efek Indonesia (BEI)). Setelah resmi menjadi bagian BEI (*go public*), maka perusahaan harus / diwajibkan menginformasikan kondisi perusahaannya kepada umum selama periode waktu tertentu.

Menurut Crystalia & Sufiyati (2019), umur listing adalah

“Umur listing merupakan waktu yang dihitung sejak perusahaan terdaftar di BEI sampai saat ini. “

Menurut Hidayat (2017), umur listing adalah

“Usia listing suatu perusahaan menunjukkan sudah berapa lama perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek sebagai perusahaan go publik.”

Berdasarkan uraian di atas umur listing adalah lama keberadaan suatu perusahaan sejak pertama kali didirikan dan/atau sejak terdaftarnya perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia.

2.2.3.2. Peranan dan Impilkasi Umur Listing

Seorang peneliti memberikan pernyataan terkait peranan dan implikasi umur listing. Seperti menurut Satwika & Sari (2021) menyatakan, perusahaan yang telah lama listing juga memiliki publisitas (pengalaman) yang lebih luas daripada perusahaan yang baru mendaftar di BEI. Dengan luasnya pengalaman sebuah perusahaan dapat mempengaruhi fleksibilitas perusahaan dalam memilih metode penyajian laporan informasi sesuai perkembangan teknologi untuk menarik investor”

Berdasarkan uraian di atas, umur listing mencerminkan tingkat kematangan dan pengalaman suatu perusahaan di pasar modal. Umur listing juga dapat mencerminkan kemampuan manajemen dalam mempertahankan reputasi dan kinerja untuk menarik seorang investor.

2.2.3.3. Siklus Hidup Umur Perusahaan

Menurut Dickinson (2011) mengklasifikasikan siklus hidup perusahaan ke dalam lima tahap. *Introduction* adalah tahap ini perusahaan berada pada fase awal

operasional. Perusahaan umumnya memiliki arus kas operasi negatif karena pendapatan belum stabil, arus kas investasi negatif akibat kebutuhan ekspansi awal, serta arus kas pendanaan positif karena masih bergantung pada pendanaan eksternal.

Growth adalah tahap perusahaan mulai mengalami peningkatan penjualan dan menghasilkan arus kas operasi positif. Namun, kebutuhan investasi masih tinggi untuk mendukung ekspansi sehingga arus kas investasi tetap negatif, dan perusahaan masih memanfaatkan pendanaan eksternal.

Maturity adalah tahap perusahaan telah mencapai stabilitas penjualan dan laba. Arus kas operasi cenderung positif dan kuat, sementara kebutuhan pendanaan eksternal menurun. Perusahaan pada tahap ini umumnya memiliki kondisi keuangan yang lebih mapan.

Shakeout adalah tahap perusahaan ditandai dengan melambatnya pertumbuhan industri dan meningkatnya persaingan. Beberapa perusahaan mulai mengalami penurunan kinerja, sehingga terjadi seleksi alam dalam industri.

Decline adalah tahap perusahaan mengalami penurunan penjualan dan laba. Arus kas operasi dapat kembali negatif, dan aktivitas investasi menurun. Pada tahap ini perusahaan berisiko mengalami kesulitan keuangan atau bahkan keluar dari pasar.

2.2.3.4. Proksi Umur Listing

Menurut para peneliti seperti Satwika & Sari (2021), Faisal et al., (2021) dan Meinawati (2020), umur listing dihitung dengan mengurangi tahun laporan

keuangan dengan tahun *Initial Public Offering* (IPO). *Initial Public Offering* (IPO) berarti tahun tercatatnya perusahaan di pasar saham.

Maka, rumus yang dapat digunakan adalah :

$$\text{Umur Listing} = \text{Tahun laporan keuangan yang diteliti} - \text{Tahun IPO}$$

2.2.4. Reputasi KAP

2.2.4.1. Definisi Reputasi KAP

Reputasi Kantor Akuntansi Publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas audit dan kredibilitas laporan keuangan suatu perusahaan. KAP dengan reputasi baik biasanya memiliki pengalaman luas, sertifikasi profesional, dan rekam jejak yang kuat dalam melakukan audit secara independen dan akurat.

Menurut Saad (2021), Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah lembaga profesional yang independen dan objektif yang memberikan jasa audit terhadap laporan keuangan suatu entitas. Melalui proses audit yang sistematis, KAP bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen agar bebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Menurut Sukmawati et al. (2024), reputasi KAP dapat diartikan sebagai tolak ukur yang memperlihatkan kualitas audit. KAP yang memiliki reputasi nama yang baik akan cenderung mempertahankan reputasinya dengan cara memberikan kualitas audit yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, reputasi KAP adalah cerminan persepsi publik

terhadap kinerja KAP berdasarkan tindakan masa lalunya dalam memberikan jasa audit yang berkualitas. KAP yang berkualitas akan menumbuhkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

2.2.4.2. Jasa yang Dilakukan KAP

Menurut Arens (2015:7-12), KAP melakukan berbagai jasa yang kepada klien. Jasa-jasa tersebut diantaranya :

1. Jasa *assurance* adalah jasa professional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Salah satu contoh jasa *assurance* adalah jasa attestasi. Jasa attestasi adalah jenis jasa *assurance* dimana KAP mengeluarkan laporan tentang suatu permasalahan atau asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa attestasi dibagi menjadi lima kategori, diantaranya :
 - a. Audit atas laporan keuangan
 - b. Audit atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan
 - c. Review laporan keuangan historis
 - d. Jasa attestasi mengenai teknologi informasi
 - e. Jasa attestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan
2. Jasa *assurance* lainnya adalah sebuah jasa yang dikeluarkan oleh KAP tetapi KAP tersebut tidak diharuskan untuk mengeluarkan laporan tertulis dan kepastian dalam jasa ini tidak harus mengenai realibilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. Contoh jasa *assurance* lainnya antara lain:
 - a. Pengendalian atas dan risiko yang berhubungan dengan investasi, mencakup kebijakan yang terkait dengan derivatif.

- b. *Mystery shopping*
 - c. Penilaian risiko pengumpulan, pendistribusian, dan penyampaian informasi digital.
 - d. Penilaian risiko kecurangan dan Tindakan ilegal.
 - e. Unsur-unsur organik.
 - f. Kepatuhan pada perjanjian royalti hiburan.
 - g. Sertifikasi ISO 9000.
 - h. Tanggung jawab dan keberlanjutan perusahaan.
3. Jasa-jasa *non assurance* adalah jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa *assurance*. Berikut adalah contoh spesifik atas jasa tersebut :
- a. Jasa akuntansi dan pembukuan.
 - b. Jasa pajak.
 - c. Jasa konsultasi manajemen.

2.2.4.3. Proksi Reputasi KAP

Menurut IAI (2011) reputasi KAP dikategorisasikan sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP nasional yang berafiliasi dengan *Big Four*.
- b. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP nasional yang berafiliasi dengan non *Big Four*.
- c. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP nasional.
- d. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP regional lokal besar.
- e. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP lokal kecil.

2.2.5. Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

2.2.5.1. Definisi Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut IAI (2016), ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lama suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut.

Menurut Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018), laporan keuangan merupakan sarana utama yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak di luar perusahaan. Laporan ini menyajikan riwayat perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter. Laporan keuangan yang paling sering disajikan meliputi: (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan laba rugi (atau laporan laba rugi komprehensif), (3) laporan arus kas, dan (4) laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap laporan keuangan.

Menurut IAI (2016) dan Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2018), Kecepatan waktu laporan keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan secara cepat dan tepat pada saat informasi tersebut masih relevan, sehingga dapat digunakan secara efektif oleh para pengguna laporan keuangan (seperti investor, kreditor, dan manajemen) dalam pengambilan keputusan. Semakin cepat laporan keuangan disampaikan setelah periode pelaporan berakhir, semakin besar manfaat informasi yang terkandung di dalamnya, karena informasi yang terlambat akan kehilangan daya guna dan

relevansinya dalam mempengaruhi keputusan ekonomi.

Menurut Fauzi & Ardini (2021), Perubahan pesat dalam lingkungan korporasi global menjadikan laporan keuangan atau tahunan dalam bentuk cetak konvensional semakin terbatas dan jarang digunakan, sebab para investor kini tersebar di berbagai wilayah sehingga format digital dianggap lebih efektif dalam mendukung pengambilan keputusan. Perusahaan dalam memanfaatkan teknologi internet untuk menyampaikan laporan keuangan dan tahunan kepada publik, yang dilakukan melalui portal Bursa Efek Indonesia (BEI) serta situs resmi perusahaan.

Informasi-informasi yang perlu disampaikan pada publik menurut Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 antara lain laporan keuangan auditan tahunan, laporan tahunan, serta rencana dan proyeksi kinerja perusahaan untuk periode mendatang. Selain informasi tersebut, Bursa Efek Indonesia juga mewajibkan publikasi insidental apabila terjadi suatu peristiwa atau informasi yang dapat mempengaruhi harga saham hingga keputusan investasi publik. Informasi-informasi tersebut seperti munculnya audit tidak wajar atau *disclaimer*, perubahan signifikan kondisi keuangan, atau transaksi korporasi seperti dilakukannya merger, akuisisi, dan restrukturisasi.

Kecepatan waktu dalam pelaporan informasi keuangan dan non keuangan tersebut adalah hal utama yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apabila terjadi keterlambatan akan ada hukum yang berlaku. Hukum tersebut ada di Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia nomor Kep-00066/BEI/09-2022. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan sanksi-sanksi yang akan didapatkan perusahaan apabila terlambat melaporkan informasi

keuangan dan non keuangan, diantaranya :

1. Permintaan penjelasan atau informasi tambahan (II.7.1).
2. Pemberian peringatan tertulis (II.7.2).
3. Pengenaan denda sesuai peraturan bursa yang berlaku (II.7.3).
4. Suspensi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (II.7.4).
5. Penghapusan pencatatan (Delisting) apabila perusahaan tidak segera memperbaiki pelanggaran. (II.7.5).

Alur sanksi di atas pada umumnya digambarkan sebagai berikut :

1. Pemberian peringatan I.
2. Pemberian peringatan II + denda Rp 50.000.000.
3. Pemberian peringatan III + denda Rp 150.000.000.
4. Suspensi.
5. Potensi Delisting.

2.2.5.2. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, jenis-jenis laporan keuangan antara lain :

1. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu berdasarkan konsep pengaitan (*matching concept*), yaitu dengan mempertemukan pendapatan dengan beban yang terkait. Selisih antara pendapatan dan beban tersebut disebut laba neto atau rugi neto.
2. Laporan ekuitas pemilik menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk suatu periode waktu tertentu. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi karena

laba atau rugi neto periode berjalan memengaruhi jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode, dan disajikan sebelum laporan posisi keuangan.

3. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas.
4. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas serta penggunaan kas tersebut dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.
5. Catatan atas laporan keuangan (CALK) menyajikan informasi tambahan dan penjelasan atas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan utama.

2.2.5.3. Tujuan Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut IAI (2016) laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut berkaitan dengan pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, termasuk penyediaan maupun penyelesaian pinjaman serta bentuk kredit lainnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Silitonga et al., (2025), laporan keuangan terbukti memberikan peran penting dalam keputusan investasi. Melalui

sampel 10 perusahaan di Indonesia, penelitian tersebut terbukti menegaskan bahwa perusahaan yang menyediakan laporan keuangan yang lengkap memperoleh respon positif berupa peningkatan investasi. Dengan kata lain, laporan keuangan berperan sangat penting dalam mempengaruhi keputusan investasi dan stabilitas modal perusahaan. Secara keseluruhan laporan keuangan berfungsi sebagai landasan utama bagi investor dalam membuat keputusan.

Menurut Togatorop & W Agus (2020), tujuan dan manfaat penyampaian informasi keuangan secara Cepat Waktu adalah

“Para investor pasti ingin menerima informasi dengan cepat, tepat serta akurat. Hal ini tentu menyebabkan suatu perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan tersebut melalui media internet dengan Cepat Waktu.”

Dari uraian di atas tujuan utama melakukan kecepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan adalah untuk menjaga relevansi dan kegunaan informasi keuangan bagi para pengguna, khususnya investor dan kreditor, dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penyampaian laporan keuangan secara Cepat Waktu memungkinkan pengguna memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan tidak kehilangan nilai informasinya, sehingga keputusan investasi, pendanaan, maupun kepemilikan instrumen keuangan dapat dilakukan secara lebih rasional dan tepat.

2.2.5.4. Proksi Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 menyebutkan apabila laporan keuangan wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. Laporan-laporan tersebut

diunggah melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia. Peraturan tersebut juga menyesuaikan dan meningkatkan pentingnya pelaporan digital pada sistem elektronik Bursa Efek Indonesia untuk mendukung penyampaian laporan keuangan secara Cepat Waktu.

Pademi Covid-19 yang menyerang dunia pada tahun 2020 membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00089/BEI/10-2020 tentang Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Surat keputusan tersebut membahas relaksasi atau perpanjangan pelaporan keuangan yang pada awalnya terakhir 31 Maret diperpanjang menjadi 31 Mei.

Relaksasi tersebut dicabut pada tahun 2023 dengan dasar Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00057/BEI/03-2023 yang mulai berlaku untuk laporan keuangan 2022. Jadi, relaksasi tersebut hanya berlaku untuk tahun 2020 dan 2021. Khusus kedua tahun tersebut, batas pelaporan keuangan tahunan yang sudah diaudit menjadi 31 Mei.

2.2.6. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini turut diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu untuk memperluas sekaligus menilai sejauh mana pengaruh masing-masing variabel. Penelitian terdahulu tersebut diambil dari berbagai jurnal referensi, diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Istani & Nigrum (2025) <i>Determinan of Financial Reporting Timeliness : An Empirical Study in Indonesian Banking Firms (2020-2022)</i>	Variabel Independen <i>Firm age, firm size, dan Financial Distress.</i> Variabel Dependen <i>Timeliness of Financial Reporting</i>	1. Usia perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh. 2. <i>Financial distress</i> berpengaruh negatif tidak signifikan.	<i>Economics & Business Solutions Journal</i> (SINTA 4)
2.	Diviariesty et al. (2025) <i>Determinan Kecepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Go Public Sektor Properti Dan Real Estate Di Indonesia</i>	Variabel Independen Kepemilikan Publik, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Opini Audit Variabel Dependen Kecepatan Waktu Pelaporan Keuangan	1. Kepemilikan publik, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan berpengaruh. 2. Opini audit tidak berpengaruh.	Jurnal Riset Akuntansi JUARA (SINTA 4)
3.	Fadillah & Mudzakir (2025) <i>Pengaruh umur perusahaan, kepemilikan</i>	Variabel Independen Umur perusahaan, kepemilikan publik dan kinerja keuangan. Variabel Dependen Kecepatan Waktu	1. Umur perusahaan dan kinerja keuangan berpengaruh. 2. Kepemilikan publik tidak berpengaruh.	Jurnal Ilmiah Kajian Mutidisipliner (SINTA 6)

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
	publik dan kinerja keuangan terhadap kecepatan waktu pelaporan keuangan	Pelaporan Keuangan		
4.	Batubara et al. (2024) <i>The Influence of Public Ownership, Listing Age, and Number of Independent Commissioners on the Timeliness of Corporate Internet Reporting in Property and Real Estate Companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2021 2023 Period</i>	Variabel Independen Kepemilikan publik, umur listing, dan jumlah dewan komisaris independen. Variabel Dependen Kecepatan Waktu Corporate Internet Reporting	Kepemilikan publik, umur listing, dan jumlah dewan komisaris independen berpengaruh.	<i>ENDLESS: International Journal of Futures Studies</i> (SCOPUS)
5.	Tarisa & Suwarno, (2024) <i>The Effect of</i>	Variabel Independen Kepemilikan publik, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage.	1. Kepemilikan publik, leverage, ukuran perusahaan berpengaruh.	<i>Management Studies and Entrepreneurship Journal</i> (SINTA 4)

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
	<i>Public Ownership, Profitability, Company Size, and Leverage on Timeliness of Financial Statement Submission</i>	Variabel Dependen Kecepatan waktu pelaporan keuangan	2. Profitabilitas tidak berpengaruh.	
6.	Rustoputri et al. (2023) Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Umur Listing, dan Jumlah Dewan Komisaris Independen terhadap Kecepatan Waktu Corporate Internet Reporting pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2017-2021	Variabel Dependen Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, Umur Listing, dan Jumlah Dewan Komisaris Independen. Variabel Dependen Kecepatan waktu Corporate Internet Reporting	1. Dewan komisaris independen berpengaruh. 2. Kepemilikan Publik, Ukuran Perusahaan, dan Umur Listing tidak berpengaruh.	GEMILANG : Jurnal Manajemen dan Akuntansi (SINTA 4)
7.	Putri & Wahyudi (2022)	Variabel Independen Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan	1. Umur perusahaan berpengaruh positif. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif.	AKSELERASI : Jurnal Ilmiah Nasional

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
	Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2020)	Profitabilitas. Variabel Dependen Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	3. Likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh.	(SINTA 4)
8.	Indriani & Nurhayati (2022) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur	Variabel Independen Ukuran Perusahaan, profitabilitas, opini audit, <i>leverage</i> , likuiditas, dan umur perusahaan. Variabel Dependen Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1. Ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif. 2. Opini audit, <i>leverage</i> , dan likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan. 3. Umur perusahaan berpengaruh positif signifikan.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis (SINTA 4)

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
	Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2020			
9.	Umar et al. (2022) Efek Opini Audit dan Kepemilikan Publik Terhadap Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Variabel Independen Opini audit dan kepemilikan publik Variabel Dependen Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Opini audit dan kepemilikan publik berpengaruh signifikan.	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (SINTA 4)
10.	Septiani & Arfianti (2022) Faktor – Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Variabel Independen Profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan rapat komite audit. Variabel Dependen Kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan	1. Profitabilitas dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh. 2. Solvabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh.	Jurnal Akuntansi (SINTA 3)
11	Kurniasih et al. (2022) Pengaruh Profitabilitas,	Variabel Independen Profitabilitas, leverage, likuiditas, dan reputasi KAP.	1. Profitabilitas, leverage, reputasi KAP, dan opini audit berpengaruh.	Cakrawala : Repository IMWI (SINTA 4)

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
	Leverage, Likuiditas, Reputasi Kap, Dan Opini Auditor Terhadap Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	Variabel Dependen Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	2. Likuiditas tidak berpengaruh.	
12.	Putri et al. (2021) <i>Analysis of Factors Affecting the Timeliness of Financial Statement Submission</i>	Variabel Independen Profitabilitas, ukuran perusahaan, opini audit, dan reputasi KAP Variabel Dependen Kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan	1. Profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh. 2. Opini audit dan reputasi KAP berpengaruh.	Jurnal Ilmu Manajemen dan Ekonomika (SINTA 4)
13.	Ginting & Natasha (2021) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Solvabilitas, Terhadap Kecepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada	Variabel Independen Ukuran perusahaan, ROA, dan DER. Variabel Dependen Kecepatan Waktu Laporan Keuangan	1. Ukuran perusahaan berpengaruh. 2. ROA dan DER tidak berpengaruh.	Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil (SINTA 4)

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
	Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017			
14.	Putra & Rumantir (2021) Pengaruh <i>Public Ownership</i> dan Profitabilitas terhadap Transparansi Informasi dengan <i>Internet Financial Reporting</i> sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen <i>Public ownership</i> dan profitabilitas. Variabel Dependen Transparansi informasi Variabel Moderating <i>Internet Financial Reporting</i>	1. <i>Public ownership</i> berpengaruh positif. 2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. 3. <i>Internet Financial Reporting</i> berpengaruh positif tidak signifikan. 4. <i>Internet Financial Reporting</i> mampu memperkuat pengaruh <i>public ownership</i> terhadap transparansi. 5. <i>Internet Financial Reporting</i> tidak mampu memperkuat profitabilitas terhadap transparansi.	Jurnal Akuntansi Manajerial (SINTA 4)
15.	Togatorop & W Agus (2020) Pengaruh <i>Good Corporate</i>	Variabel Independen <i>Good Corporate Governance</i>, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i>	1. <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan. 2. Profitabilitas berpengaruh positif.	JAFTA : <i>Journal of Accounting, Finance, Taxation, and</i>

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
	<i>Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Kecepatan Waktu Corporate Internet Reporting (Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018)</i>	Variabel Dependen <i>Corporate Internet Reporting</i>	3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan. 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh.	<i>Auditing (SINTA 6)</i>

Sumber : Diolah peneliti, 2026

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Kecepatan Waktu

Penyampaian Laporan Keuangan

Kepemilikan publik merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat transparansi dan ketepatan waktu penyampaian informasi perusahaan. Menurut Sandy (2019), perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang besar cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi karena adanya dorongan dari pihak publik serta kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara

manajemen dan pemegang saham. Investor sebagai pihak eksternal membutuhkan informasi perusahaan secara cepat dan menyeluruh untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen serta memastikan kepentingannya sebagai pemegang saham terpenuhi.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui *Political Cost Hypothesis*.. Perusahaan dengan kepemilikan publik yang lebih besar cenderung memperoleh perhatian dan pengawasan yang lebih tinggi dari pihak eksternal karena informasi perusahaan menjadi kepentingan banyak pemegang saham. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan bagi manajemen untuk menjaga transparansi serta memenuhi tuntutan pelaporan. Penyampaian laporan secara Cepat Waktu menjadi salah satu bentuk perusahaan dalam menunjukkan kepatuhan, transparansi, dan tanggung jawab kepada publik. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan publik, semakin besar dorongan perusahaan untuk menyampaikan informasi perusahaan secara Cepat Waktu guna mempertahankan kepercayaan publik dan mengurangi tekanan dari pihak eksternal.

Selain itu, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan *Organizational Learning Theory* yang menjelaskan bahwa organisasi dapat meningkatkan kemampuan dan efektivitas prosesnya melalui pengalaman dalam menghadapi berbagai tuntutan dan kondisi yang dihadapi. Perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar menghadapi tuntutan informasi dari pemegang saham yang lebih luas sehingga perusahaan terdorong untuk mengembangkan prosedur, sistem, dan mekanisme pelaporan yang lebih baik. Pengalaman perusahaan dalam memenuhi tuntutan keterbukaan informasi tersebut dapat membantu manajemen menyusun

dan menyampaikan laporan secara lebih efektif dan Cepat Waktu.

Penelitian Putra & Rumantir (2022) menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah saham yang dimiliki publik dapat mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Kepercayaan tersebut mendorong perusahaan untuk mempertahankan kinerja dan keterbukaan informasi agar kepercayaan publik tetap terjaga. Dengan demikian, semakin besar kepemilikan publik, semakin besar pula tuntutan perusahaan untuk menyediakan informasi yang transparan dan Cepat Waktu sehingga dapat mengurangi kesenjangan informasi antara manajemen dan pemegang saham.

Berdasarkan temuan teori dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin besarnya saham yang dimiliki publik maka semakin sedikit juga waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan.

2.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kecepatan Waktu

Penyampaian Laporan Keuangan

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor penting yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Menurut N. Putri & Irwandi (2017), ukuran perusahaan yang bisa dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar membuat keyakinan investor meningkat. Perusahaan dengan ukuran kecil biasanya memiliki keterbatasan sistem pelaporan informasi, sementara perusahaan yang besar cenderung lebih aktif menyampaikan informasi kepada

publik.

Hubungan antara ukuran perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan dapat dijelaskan melalui *Political Cost Hypothesis* perusahaan yang berukuran besar cenderung memperoleh perhatian yang lebih besar dari publik, investor, pemerintah, maupun regulator karena kegiatan dan informasi yang dimiliki perusahaan lebih luas. Besarnya perhatian tersebut dapat meningkatkan tekanan bagi manajemen untuk menjaga transparansi dan memenuhi ketentuan pelaporan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyampaikan informasi perusahaan secara Cepat Waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi serta upaya untuk mempertahankan citra dan kepercayaan publik. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula dorongan perusahaan untuk menghindari keterlambatan dalam penyampaian informasi.

Ukuran perusahaan dapat dikaitkan dengan *Organizational Learning Theory*, yang menjelaskan bahwa kemampuan organisasi dapat berkembang melalui pengalaman dan proses pembelajaran dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang berukuran besar umumnya memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, sumber daya manusia yang lebih banyak, serta sistem dan prosedur yang lebih terstruktur. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola proses penyusunan serta penyampaian laporan. Melalui pengalaman dalam menghadapi tuntutan pelaporan dan regulasi, perusahaan dapat mengembangkan prosedur kerja yang lebih efektif sehingga proses pelaporan dapat

dilakukan secara lebih efisien dan Cepat Waktu.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ginting & Natasha (2021), mendapatkan temuan hasil yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang berskala besar umumnya memiliki citra yang baik di mata publik. Skala perusahaan yang besar didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sistem yang memadai, sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat. Selain itu, besarnya ukuran perusahaan mencerminkan banyaknya informasi yang harus diungkapkan yang meningkatkan kesadaran manajemen akan pentingnya transparansi. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan sehingga menyampaikan laporan keuangan secara Cepat Waktu.

Berdasarkan temuan teori dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin besarnya ukuran perusahaan maka semakin sedikit juga waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan.

2.3.3. Pengaruh Umur Listing terhadap Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Umur listing merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan pengalaman dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pelaporan di pasar modal. Menurut Hardanis et al., (2024), Umur perusahaan mempengaruhi kecepatan waktu pelaporan keuangan melalui pengalaman dan keahlian yang terakumulasi seiring waktu. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengelola proses pelaporan dengan lebih efisien dan akurat.

Political Cost Hypothesis menjelaskan perusahaan yang telah lama menjadi perusahaan terbuka telah lebih lama berada dalam lingkungan yang mendapatkan perhatian dari investor, regulator, dan masyarakat. Semakin lama perusahaan terdaftar di bursa, semakin besar pula pengalaman perusahaan dalam menghadapi tuntutan transparansi dan pengawasan dari pihak eksternal. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mempertahankan reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun selama menjadi perusahaan terbuka. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah memenuhi kewajiban pelaporan dan menyampaikan informasi perusahaan secara Cepat Waktu. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki umur listing lebih lama cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk menjaga kepatuhan dan transparansi dalam pelaporan.

Dari perspektif *Organizational Learning Theory* pengalaman yang diperoleh selama perusahaan menjadi perusahaan terbuka dapat membentuk rutinitas dan prosedur pelaporan yang semakin baik. Perusahaan dapat belajar dari proses pelaporan pada periode sebelumnya, termasuk mengidentifikasi hambatan dan memperbaiki proses penyusunan serta penyampaian informasi. Pengalaman tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi proses pelaporan dan mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Batubara et al., (2024), mendapatkan temuan hasil yang menjelaskan bahwa perusahaan yang sudah lama listing di Bursa Efek Indonesia dinilai lebih kompetitif, inovatif, dan mampu bertahan. Hal tersebut yang memungkinkan perusahaan lebih mampu menjaga ketepatan waktu dalam penyampaian informasi laporan keuangan.

Berdasarkan temuan teori dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa umur listing berpengaruh negatif terhadap kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin lamanya usia perusahaan maka semakin sedikit juga waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan.

2.3.4. Pengaruh Reputasi KAP terhadap Kecepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Reputasi KAP merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan tingkat keandalan dan kualitas hasil audit laporan keuangan perusahaan. Menurut Ovelina et al., (2024) kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan aspek penting yang dipertimbangkan oleh perusahaan dalam memilih pihak auditor. Untuk memastikan laporan audit dapat diselesaikan secara Cepat Waktu, perusahaan biasanya memilih KAP yang memiliki reputasi baik dan tingkat profesionalisme yang tinggi.

Menurut Arens et al., KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya, kompetensi, pengalaman, serta prosedur audit yang lebih memadai dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan. KAP dengan reputasi yang baik juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa audit yang diberikan. Oleh karena itu, proses audit dilakukan dengan memperhatikan standar profesional dan prosedur yang sistematis.

Perusahaan yang menggunakan jasa KAP bereputasi, khususnya KAP yang termasuk dalam kelompok Big Four, cenderung memperoleh proses audit

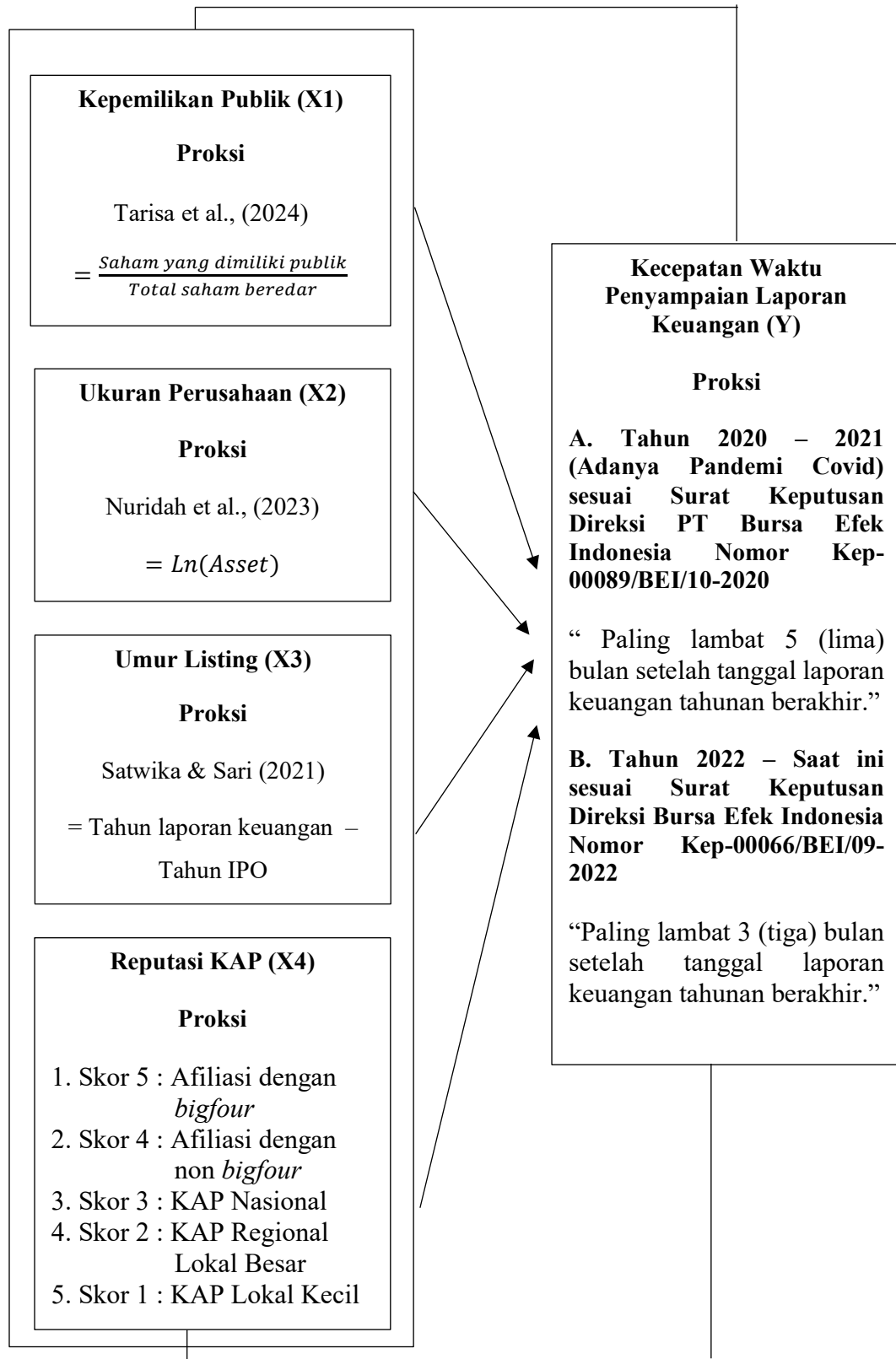
yang didukung oleh sumber daya dan sistem kerja yang lebih terstruktur. Ketersediaan auditor yang memiliki kompetensi dan pengalaman serta penerapan prosedur audit yang sistematis dapat membantu auditor dalam menyelesaikan proses pemeriksaan secara lebih efektif. Penyelesaian audit yang efektif memungkinkan perusahaan memperoleh laporan audit dalam waktu yang lebih cepat sehingga dapat mendukung ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Indayani (2020) mendapatkan temuan hasil yang menjelaskan bahwa penggunaan Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tinggi mencerminkan kualitas audit yang baik serta tingkat kredibilitas yang lebih tinggi di mata publik dan investor. Perusahaan yang diaudit oleh KAP bereputasi, khususnya yang berafiliasi dengan *Big Four*, cenderung termotivasi untuk menyampaikan laporan keuangan secara lebih cepat guna menjaga kepercayaan dan citra perusahaan. Proses audit yang lebih sistematis dan profesional pada KAP bereputasi juga membantu mempercepat penyelesaian laporan keuangan. Sehingga perusahaan lebih bisa cepat dan Cepat Waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan temuan teori dan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Semakin tingginya reputasi KAP maka semakin sedikit juga waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan.

Atas uraian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, berikut penyajian kerangka konseptual penelitian secara sistematis yang menggambarkan hubungan antara fenomena dengan teori, serta alur penelitian pada bagan dibawah ini.

Kerangka Konseptual Penelitian



2.4. Hipotesis

Menurut Greselda (2024), hipotesis adalah sebuah dugaan sementara mengenai adanya keterkaitan antara variabel-variabel yang digunakan, yang disusun berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- H3 : Umur listing berpengaruh negatif terhadap kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan,
- H4 : Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
- H5 : Kepemilikan publik, ukuran perusahaan, umur listing, dan reputasi KAP berpengaruh terhadap kecepatan waktu penyampaian laporan keuangan.